
Submitted: 11/12/2019

Reviewed: 6/5/2020

Published: 5/10/2030

CONTACT

Correspondence Email:
herman@uinib.ac.id

KEYWORD

Kolonialisme; Pendidikan;
Minangkabau

KOLONIALISME, PENDIDIKAN DAN MUNCULNYA ELIT (MINANGKABAU MODEREN : SUMATERA BARAT ABAD KE : 19)

HERMAN¹

¹ Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Konsentrasi Sejarah), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRAK

Dalam jangka panjang, dasar kebijaksanaan pendidikan kolonial adalah untuk menghasilkan calon tenaga pegawai yang terdidik, untuk kemudian ditempatkan di dalam berbagai jabatan dinas pemerintah. Sistem tanam paksa atau usaha-usaha swasta yang memerlukannya, kualifikasi pendidikan, karenanya menjadi alat penyeleksi dan melatih orang untuk memegang posisi tertentu dalam birokrasi pemerintah, tetapi pada saat yang sama juga menjadi simbol status yang tinggi ditengah-tengah masyarakat. Dari segi perbandingan, mereka yang telah memanfaatkan kesempatan pendidikan Barat itu tidaklah begitu besar bilangannya, akan tetapi hasil dari kebijaksanaan pendidikan pemerintah itu tidaklah sepadan dengan jumlah yang terlibat secara langsung di dalamnya. Sebenarnya pemerintah Belanda disadari atau tidak telah mengambil langkah-langkah untuk melahirkan golongan elit terpelajar dengan tidak memikirkan sungguh-sungguh bagaimana golongan elit baru itu digunakan. Sejak dasawarsa terakhir abad ke-19, terdapat banyak pengangguran bekas murid dari berbagai sekolah, bukan saja karena jabatan-jabatan dalam dinas pemerintah di Sumatera Barat tidak mampu menampung mereka, melainkan juga karena bersamaan dengan meningkatnya murid-murid tamatan sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya masih langka.

I. PENDAHULUAN

Hindia- Belanda pernah disebut sebagai *Beamtenstaat*¹, sebuah negara pegawai, dimana terdapat jaringan birokrasi pemerintah yang sangat luas dan rumit. Karena birokrasi disini merupakan alat instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan tuntutan – tuntutan kolonial, maka hampir boleh dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan diarahkan bagi kepentingan Belanda. Selama abad ke 19 dan lebih nyata lagi sejak awal kolonial yang sempurna², sedangkan sebagian besar tenaga pegawainya didukung oleh orang – orang Bumiputera.

Agaknya memang benar, bahwa roda pemerintahan yang dikendalikan dari Batavia itu, senantiasa berputar seperti “ mesin – mesin pabrik yang siap semaksimal hasilnya”. Dan dengan itu pemerintah kolonial boleh mengharapakan, bahwa daerah koloni harus dapat memberikan keuntungan bagi perbendaharaan negara³.

Oleh karena itu pemerintah terutama berarti menjalankan administrasi, yang dalam arti teknis, rasional dan termasuk bidang tulis menulis beserta perangkat upacara-upacaranya, pendidikan, karenanya adalah merupakan bagian yang sangat penting dari rangkaian kebijakan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.

Di dalam sejarah kebijaksanaan pendidikan kolonial⁴ di Hindia Belanda, orang dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah, baik yang langsung didirikan oleh pemerintah maupun oleh para misionaris, atau pihak swasta. Sekolah sekolah itu cenderung mencerminkan kekuatan dan kepentingan pemerintah kolonial. Walaupun sistem pendidikan yang digalakkan sedikit banyak memberi peluang baik bagi pembuat kebijakan dan penduduk Bumiputera, sekolah-sekolah terutama bertujuan untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial sendiri. Yang paling penting dalam hal ini ia ialah birokrasi pemerintahan atau menjadi pegawai pada perubahan – perubahan industri swasta dan berdagang.

Di bawah kolonialisme, hubungan pendidikan dan masyarakat adalah sesuatu yang kompleks. Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pemerintah berada di tangan orang – orang Eropah, aspirasi – aspirasi yang berkembang dalam masyarakat biasanyasengaja dilupakan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan di kembangkan menurut model Barat, baik organisasi, maupun kurikulum “ia merupakan hasil manipulasi kebudayaan yang berakar dari negeri asal si penjajah, dan karenanya bukan hasil pertumbuhan lokal”⁵.

Antaranya pemerintah dan masyarakat terdapat perbedaan pandangan dalam cara mereka melihat kehadiran lembaga pendidikan itu. Tetapi dikalangan masyarakat setempat sendiri bahkan juga muncul berbagai pandangan, dengan alasannya sendiri – sendiri. Sementara suatu kelompok sosial tertentu melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai yang menguntungkan dan karenanya mereka dapat menerimanya dengan baik, yang lain sebaliknya menolak atau bersikap apatis. Bagaimanapun juga keanekaragaman pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam situasi kolonial, masyarakat tidak lagi bebas menentukan arah bagi pendidikan mereka, dan untuk itu hanya ada pilihan : menerima atau menolak apa yang ditawarkan pemerintah kolonial atau mengambil pilihan lain menurut cara - cara yang mereka anggap lebih aman.

Apakah pola - pola di atas dapat ditemukan dalam cara-cara masyarakat Minangkabau memberikan reaksinya terhadap pendidikan kolonial? atau bagaimanakah kecenderungan yang terjadi di daerah ini ketika penduduknya diperkenalkannya pada sekolah - sekolah yang dibawa oleh pemerintah kolonial?. Selanjutnya sejauh mana dampak pendidikan kolonial terhadap struktur

¹(The Hague: Martinus Nijhoff, 1968) khususnyapp.103-105.

² Philip G. Altbach and Gail P. Kelly, *Education and Colonialisme* (New York : 1978) terutama pada Bab Pendahuluan, pp.1-47.

³*The Emergence Of the Modern Indonesian Elit* (The Hague and Bandung, 1960) pp. 2, 29, 165, dan242.

⁴*The Minangkabau Response to Teach Colonial Rule In the Nineteenth Century* (ithaca, New York : Monograph Series, No. 60, Cornell Modern Indonesia Project,1981.

⁵ M. Joustra, *Batakspingel* (Leiden : S.C. Van Dusburg, 1926), p.32.

sosial setempat, khususnya sehubungan dengan kehadiran kelompok sosial baru atau apa yang disini disebut elit modern?⁶

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap sejarah pendidikan kolonial di Minangkabau abad ke- 19, terutama dengan menitik beratkan pembahasan sekitar pokok persoalan yang diajukan di atas, guna memudahkan pendekatan kita dalam mengembangkan penguraian selanjutnya, tulisan ini pertama - tama ingin menyoroti proses pertumbuhan sekolah-sekolah sekuler, sebagai bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah kolonial di daerah ini. Kemudian setelah melihat saling hubungan antara sekolah dengan masyarakat dalam kaitannya dalam usaha untuk menelusuri reaksi penduduk terhadapnya, tulisan ini selanjutnya mencoba kembali mengkaitkannya dengan beberapa pokok kesimpulan yang mungkin dapat ditarik dari kerangka persoalan yang diajukan pada bagian pertama di atas.⁷

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitan berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya”.⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan untuk meneliti secara spesifik mengenai kompetensi kepribadian guru dalam pembelajaran sejarah, Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Penelitian ini dikatakan sebuah penelitian kepustakaan karena pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature.⁹ Penelitian yang diadakan di perpustakaan dan bersumber pada data-data informasi yang tersedia di ruang perpustakaan.¹⁰

III. PEMBAHASAN

Sampai pertengahan tahun 1840-an, pengembangan sekolah – sekolah sekuler yang diusahakan pemerintah tidaklah menunjukkan kemajuan yang berarti. Kecuali ada dua buah di Padang 14, tidak satupun sekolah serupa dapat dibangun di kawasan pedalaman (Padangsche Bovenlanden). suatu usaha yang lebih bersungguh - sungguh dan merupakan sukses pertama dari dalam rangka pengembangan sekolah - sekolah itu baru terjadi kemudian ketika Steimetz, Residen Padangsche Bovenlanden mencoba mendorong berdirinya apa yang disebut Sekolah Negeri di Bukittinggi pada tahun 1843.

Agak berlainan dengan sekolah sekolah sekuler yang didirikan di Padang, sekolah yang dipelopori oleh Residen C.P.C. Steinmetz ini lebih bersifat otonom dan menerimanya murid dari kalangan masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan status atau posisi keluarganya dalam masyarakat. Sebab itu ketika sekolah baru saja dibuka cukup banyak yang datang mendaftarkan diri. Dalam tahun 1846, yakni tiga tahun setelah sekolah pertama dibuka di Bukittinggi, terdapat tidak kurang dari 11 buah sekolah yang didirikan ; lima buah diantaranya terdapat di pusat - pusat pemerintahan di kawasan pedalaman.

Pada tahun yang sama (1846) ada 75 orang tamatan sekolah ini yang kemudian ditempatkan sebagai tenaga administratif dalam birokrasi pemerintah, seperti Klerkas, dan yang diperbantukan pada kantor Laras, tetapi sebagian juga menjadi personil pada sistem tanam paksa kopi. Tawaran

⁶ E. B. Kielstra, “*Koffij Cultuur ter Sumatra's*” estkust” IG, X (1888), p.1458.

⁷ Mestika Zet, MA. Dibawah judul: *Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial dalam Sistem*

⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2009) *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara), h.1

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h.3

¹⁰ kartini Kartono, (1980), *pengantar metodologi research social*, (Bandung: alumni), h. 28

yang telah diajukan pemerintah melalui kesempatan kerja yang relatif baik, agaknya telah mendorong penduduk untuk memasuki sekolah - sekolah itu, sementara Minangkabau ketika itu memang mulai terikat ke dalam pengarahannya sistem tanam paksa kopi.

Sekolah-sekolah yang dikembangkan Steimetz, bagaimanapun juga telah menjadi model bagi pengembangan sekolah sekolah kolonial pada periode selanjutnya, sekurangnya sampai tahun 1870- an. Cirinya yang utama ialah bahwa sekolah - sekolah didirikan atas kerja sama pemerintah lokal kulit putih dengan pejabat bumiputera setempat, dimana pihak yang pertama mendorong para kepala untuk merasa tanggung jawab dalam pengadaan fasilitas belajar sebelum bangunan fisik dapat dipersiapkan, murid - murid biasanya mengambil tempat belajar pada gudang gudang kopi pemerintah, atau di "Balai Adat" nagari setempat. Sedangkan penyediaan fasilitas lainnya seperti bangku, meja dan kursi, sekalipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali (dan lebih banyak dari pada bambu), dikerjakan secara bergotongroyong dengan penduduk setempat.

Pengadaan tenaga guru merupakan rintangan yang paling suka dipecahkan, dan karena itu hanya ada satu atau dua orang yang kebetulan sudah mengenal pengetahuan tulis baca secara baik, atau melek huruf yang diperolehnya dari pengalaman sendiri. Biasanya mereka ini diambilkan dari pejabat-pejabat bumiputera yang bekerja sebagai kepala gudang (Pakhuis- Meester, atau sekretarisnya. Sedangkan gaji guru ini ditarik dari uang kas negeri. Hampir semua sekolah tidak pernah mengadakan pungutan uang sekolah, tetapi semua murid pada umumnya dibebankan membiayai sendiri perlengkapan sekolahnya seperti pakaian dan lain -lainnya.

Kurikulum yang dikembangkan pada sekolah ini pada prinsipnya masih sangat sederhana sekali. Selama tiga tahun mata pelajaran melalui empat tahap. Pada tahap pertama, murid-murid diajarkan pengetahuan membaca dan menulis, dan pada tahap kedua mulai dengan berhitung. Pada tahap ketiga dan keempat mata pelajaran ditambah dengan pengetahuan, seperti cara membuat surat, pembukaan yang sederhana, geografi dan pengetahuan berhitung dalam tingkat yang telah rumit.

Semua mata pelajaran berlangsung dan disajikan dalam bahasa Melayu, kecuali pada tahun pertama, di mana murid - murid masih dibiarkan menulis bahasa Melayu dalam alpabet Arab. Pada tahun - tahun berikutnya mereka secara lambat laun diajarkan menulis bahasa Melayu dalam abjad Latin. Sejauh menggunakan bahasa Melayu, murid - murid sama sekali tidak mengalami kesulitan, terutama karena bahasa Minangkabau yang mereka pergunakan sehari - hari sangat dekat dengan bahasa Melayu yang dipergunakan di Hindia Belanda ketika itu.

Dalam tahun 1850-an, usaha penyebaran sekolah - sekolah negeri semakin diperluas ke beberapa tempat di luar Padangsche Bovenlanden. terutama di kawasan pantai barat dan sekitarnya (Padangsche Bovenlanden). Selain di Padang, yang sejak periode awal pendudukan Belanda di daerah ini (1819) setidaknya sudah ada dua buah sekolah yang didirikan pada tahun (1853) didirikan sebuah sekolah lagi. Juga di Pariaman (1854) dan di Air Bangis pada tahun yang sama, serta di Pesisir Selatan, Pelangi (1858), dan Asam Kumbang (1859). Demikian juga di kawasan utara pedalaman, dengan kecualikan di Bonjol, dimana sekolah negeri sudah ada sejak tahun 1840-an, didirikan beberapa buah sekolah serupa seperti di Lubuk Sikaping, Panti, Talu dan Rao. Pada dewasanya yang sama sekolah - sekolah sudah menyebar ke hampir seluruh Sumatera Barat, termasuk ke Residensi Tapanuli.

Suatu perkembangan baru dalam sejarah pendidikan barat di daerah ini ditandai dengan didirikannya sebuah sekolah guru, Normal School atau Kweekschool di Bukittinggi pada bulan April 1856. Sebagai akibat logis dari perluasan sekolah - sekolah negeri, adalah semakin meningkatnya kebutuhan tenaga guru, sedangkan pemerintah tidak mungkin untuk mendatangkannya dari luar. Akan tetapi hal itu juga berhubungan dengan perluasan geografis dan jabatan - jabatan baru dalam birokrasi pemerintah. Selama ini kriteria untuk menjadi pegawai pada dinas pemerintah, termasuk dinas Tanam Paksa Kopi tidak mempertimbangkan kecakapan dan pendidikan yang diperoleh. Pejabat - pejabat bumiputera, seperti juga dengan kepala gudang dan sekretarisnya,

meskipun sebagian memiliki pengetahuan tulis baca yang baik, sejak semula lebih banyak ditentukan berdasarkan sifat berhubungan kekeluargaan dengan elit tradisional, atau mengutamakan mereka yang dekat hubungannya dengan rezim kolonial. Sebab itu, pengangkatan mereka adalah hasil pengaruh, kewibawaan status yang diwariskan.

Tahap awal dari pengembangan pada Normal School, lebih pertama di Surakarta. Murid - murid yang diterima pada sekolah ini tidak perlu tamatan sekolah negeri, tetapi batasan umur paling kurang sudah harus mencapai 14 tahun. Selain itu mereka yang mendaftar pada sekolah ini juga dikarenakan persyaratan, bahwa calon murid sudah harus memiliki pengetahuan siap sebelumnya seperti, membaca dan menulis bahasa Melayu secukupnya, baik dalam alfabet Arab, maupun Latin, tetapi juga berhitung yang sederhana. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah ini, murid - murid menerima berbagai macam mata pelajaran, kecuali membaca dan menulis dalam bahasa Melayu (bahasa Belanda kemudian membuat surat, tetapi belum ada paedagogi).

Sebagai satu - satunya sekolah guru di Sumatera, Norma School Bukittinggi pada fase awalnya lebih banyak dikelola oleh penduduk bumiputera. Kepala sekolahnya yang pertama adalah Abdu Latif Sutan Nagari, seorang pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan, sementara asisten residen dan bawahannya tidak mengambil banyak bagian dalam pengembangannya. Karena itu, dalam usianya yang masih muda, sekolah ini tidak lebih dari sekolah dasar biasa. Tahun pertama sejak sekolah ini tidak lebih dari 10 orang murid yang mendaftarkan diri. Pemerintah bermaksud untuk membuatnya sebagai duplikat Kweekschool Surakarta, tapi dalam ukurannya yang lebih kecil. Beberapa buku bacaan dan pelajaran yang dipakai di Surakarta juga dipergunakan di Kweekschool di Bukittinggi. Namun karena berbagai kesukaran, seorang pejabat Belanja yang mengunjungi sekolah ini pada tahun 1866, mendapat kesan yang mengecewakan. Selama 10 tahun berjalan, sekolah ini hanya mampu menamatkan 10 orang murid, dan itu pun tidak semuanya menjadi guru. Namun demikian, dalam tahun 1863 saja, guru - guru yang mengajar di 9 buah sekolah di kawasan Padangsche Bovenlanden, jika tidak semuanya tamat, pernah bersekolah pada Normal School.

Beberapa perubahan penting dalam kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial baru nampak tahun 1870-an, yakni bersamaan dengan perubahan - perubahan besar dalam kerangka politik kolonial yang ditandai dengan Era Liberal.

Pertama-tama adalah terjadinya perubahan perlahan lahan dari sekolahsekolah negeri yang otonom, ke sekolah dasar yang langsung berada dibawah kontrol pemerintah. Campur tangan pemerintah kemudian bukan saja dari segi pembiayaan, tetapi juga organisasi dan kurikulum sekolah. Sebelum tahun 1870-ansekolah - sekolah negeri yang ada hampir sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah lokal dan penduduk setempat. Sekitar tahun 1860-an misalnya hanya beberapa sekolah saja, seperti di Padang, Pariaman, Tarusan dan Normal School di Bukittinggi yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah pusat, sedangkan 26 buah lainnya hampir sepenuhnya bergantung pada usahasetempat.

Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sekolah juga terlihat sejak sekolah guru Normal School (Kweekschool) berubah nama menjadi sekolah Raja pada tahun 1872. Kecuali mendapat sokongan keuangan yang lebih besar, sekolah itu juga memberikan mata pelajaran yang lebih rumit dari yang sebelumnya. Kecuali beberapa mata pelajaran yang sudah diajarkan juga pada tahun - tahun sebelumnya, sejak itu ditambah dengan beberapa mata pelajaran baru seperti, paedagogi, geometri, menggambar, menyanyi dan beberapa pengetahuan keahlian, terutama mengenai teknik - teknik pertanian, sedangkan mata pelajaran bahasa belanda termasuk mata pelajaranwajib.

Sekolah Raja Bukittinggi kemudian menjadi simbol dan kebanggaan penduduk di sekitar. Seorang pengamat Belanda menilai, bahwa sekolah raja setidaknya sejak dua dasawarsa terakhir abad ke-19 kurang lebih menyamai sekolah - sekolah menengah di negeri Belanda, baik dari segi bangunan fisiknya, maupun dari segi kurikulum yang diajarkan pada murid-muridnya. Bagi

murid-muridnya disediakan asrama, dengankamar-kamar tempat tinggalnya, lengkap dengan seorang pembantu yang siap melayani urusan keperluan sehari-hari. Mereka juga mendapat pengajaran dan bimbingan yang seksama, bukan saja dalam kegiatan di kelas, akan tetapi juga di luar sekolah. Disamping itu, juga terdapat beberapa orang guru kulit putih yang diperbantukan ke sekolah ini. Efek dari perlakuan istimewa ini jelas berlangsung dalam suasana seperti diperbelandakannya, baik dalam bahasa sehari-hari, maupun disiplin dan cara berpakaian mereka, tetapi diragukan apakah nilai-nilai baru yang mereka anut dimengerti sepenuhnya.

Suatu perubahan penting lainnya dalam arah perkembangan pendidikan sejak akhir abad ke-19 di daerah ini ialah ketika pemerintah mencoba membagi sekolah dasar (bekas dari sekolah negeri yang sebelumnya) ke dalam dua kategori yakni : sekolah kelas satu Eerste Klasse School untuk anak - anak para pejabat pemerintah dan bangsawan, dan sekolah kelas dua Klasse Schoolen untuk umum. Dilihat dari sudut pandangan pemerintah, kebijaksanaan ini merupakan suatu langkah maju, terutama untuk mengulangi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya sampai kelas dua, mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dalam tempo tiga tahun, dan kemudian dapat memanfaatkan untuk keperluan mencari kerja, atau mengajar di kampung. Tetapi pada kenyataannya dengan ini berlainan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Sampai awal abad ke-20, setidaknya menjelang diadakannya pembaharuan pendidikan setelah masa politik etis, gagasan mengenai sekolah kelas satu tidak mendapat sambutan masyarakat. Anak - anak pejabat lokal jarang yang mau bersekolah di sana, dan mereka malah lebih senang memilih Sekolah Swasta dimana kegiatan belajar disajikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Reaksi ini agak berbeda dari yang berlaku di Jawa, disana kalau bukan memasuki sekolah kelas satu para bangsawan dapat masuk sekolah dasar Eropa.

Sungguhpun akibat dari kebijaksanaan pemerintah itu sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap jalur masuk ke sekolah - sekolah pemerintah di daerah ini, tetapi iamenjadi kurang penting disebabkan oleh proses - proses yang telah terciptakan sejak periode sebelumnya. Lebih - lebih lagi sejak pemerintah Batavia mendirikan apa yang lazim disebut Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1851 kecenderungan untuk ingin mengambil kesempatan pendidikan ini ternyata telah ditunjukkan dengan adanya dua orang putera Minangkabau mendaftarkan diri pada tahun 1856. Jumlah itu diperkirakan meningkat terus pada tahun - tahun berikutnya, terutama karena diajukannya oleh pemerintah sejumlah tawaran - tawaran yang menarik, seperti pembebasan dari semua biaya sekolah, termasuk biaya perjalanan ke Batavia. Tetapi dibalik itu jugaterletakkebanggaan titel " Dokter Jawa" dan jabatan, yang akan diperoleh dari tamatan sekolah itu, sesuatu yang pasti masih amat langka di Sumatera Barat ketika itu.

Bagaimanapun juga, meningkatnya minat pendidikan anak - anak bumiputera sebetulnya mencerminkan gejala umum dikalangan masyarakat Minangkabau dari kelas atas dan menengah. Pendidikan nampaknya tidak lagi sekedar prestise dan alat untuk mempertahankan status, melainkan juga menjadi arena persaingan dalam merebut kesempatan-kesempatan yang terbuka dalam sistem kolonial. itu bukan saja berkenan dengan kemungkinan perbaikan prospek ekonomi mereka, melainkan juga menjadi sarana mobilitas sosial. Apalagi dengan dibukanya lagi sebuah sekolah baru OSVIA (Opleiding School Voor Irlandeehe Arabtenaren) di sekitar pergantian abad ini, maka peluang untuk mengambil kesempatan pendidikan sebagai calon pegawai terdidik secara khusus semakin diperluas³⁴. Pada akhir abad ke-19 lengkaplah gambaran ideal yang menjadi cita - cita dan kebanggaan semua anggota masyarakat, yaitu seperti yang telah diungkapkan dengan tepat oleh seorang penulis kalau bukan menjadi Angku Dokter (dokter Jawa), boleh jadi Angu Larasatau Angku Guru.

Perluasan sekolah-sekolah kolonial, sebagaimana telah dikemukakan di depan, baru terjadi sekitar tahun 1840-an, ketika Residen Steinmetz mendorong berdirinya sekolah- sekolah sekuler seiring dengan pelaksanaan sistem tanam paksa kopi. Steinmetz percaya bahwa pemuda Minangkabau akan tertarik dengan nilai-nilai pendidikan apabila kepada mereka diberikan

gambaran masa depan yang lebih baik. Meskipun tujuan utama dari sekolah itu adalah untuk menghasilkan sejumlah tenaga terdidik yang akan ditempatkan dalam birokrasi kolonial di tingkat lokal, atau untuk menjadi personil pada urusan sistem tanam paksa kopi, namun pengetahuan yang mereka peroleh nantinya juga merupakan bagian dari usaha untuk membentuk “warga negara” yang baik, baik kondisi kesehatan, ataupun kondisi hidup mereka kemudian juga akan dibawa meniru gaya hidup dan kebudayaan Eropah.

Demikianlah kemudian beberapa sekolah yang telah didirikan di pedalaman Padangsche Bovenlanden pada umumnya cenderung mengikuti pola penyebaran gudang- gudang kopi pemerintah. Gudang kopi itu sendiri yang terletak dekat titik produksi kopi pedalaman, sejak semula memiliki fungsi ganda, ia bukan saja merupakan batu loncatan bagi penetrasi ekonomi kolonial ke pedalaman, tetapi pada saat yang sama juga merupakan lembaga pendidikan dimana sekolah-sekolah fase pertamadiselenggarakan.

Dari empat pusat pemerintahan kolonial di kawasan Padangsche Bovenlanden, kecuali Batusangkar, Payakumbuh dan Solok, maka Bukittinggi yang terletak di dataran tinggi Agam adalah merupakan pusat pemerintahan yang paling penting dimana terletak kantor Residen dan Asisten Residen. Bukittinggi juga merupakan pusat pengumpulan kopi pemerintah di kawasan pedalaman dari mana penyebaran sekolah-sekolah ke negeri- negeri sekitar dilakukan, dengan mengikut arah penyebaran gudang-gudang kopi pemerintah.

Dari 16 buah sekolah yang tersebar di kawasan Padangsche Bovenlanden 10 buah diantaranya terletak di kawasan Agaam dan hampir semuanya mengambil tempat di gudang-gudang kopi pemerintah. Kenyataan ini bukan tanpa alasan. Pertama-tama tentu saja adalah karena kesulitan dalam soal pengadaan tenaga guru dan bangunan fisik sekolah, sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan sekolah-sekolah negeri pada fase awal umumnya. Pusat-pusat pengumpulan kopi pemerintah itu, kecuali memiliki tenaga pegawai yang relatif sudah mengenal pengetahuan tulis baca, atau melek huruf, terutama sekali kepala gudangnya (Pakhuismeestor) dapat diangkat sebagai tenaga guru di samping menjalankan tugasnyasehari-hari.

Dari segi pendidikan, karena sekali lagi keterbatasan sumber-sumber yang tersedia adalah tidak mungkin disini untuk mengungkapkan perincian mengenai latar belakang keluarga orang tua murid yang pernah memasuki sekolah Barat yang dibicarakan di muka, namun beberapa bukti yang masih sangat bersifat fragmentaris cenderung menyarankan bahwa peluang pendidikan seperti yang juga berlaku di lain tempat umumnya, semula terbatas pada kelompok tertentu saja seperti, golongan bangsawan tradisional atau apa yang disebut kelas priyayi tinggi di Jawa. Di Minangkabau sebagaimana telah disinggung juga di muka, mereka ini ialah golongan aristokrat untuk kawasan pantai, dan para penghulu yang kemudian diangkat menjadi Penghulu Kepala dan Laras di kawasan pedalaman.

Akan tetapi dengan bertambah meluasnya penyebaran administrasi pemerintah dan jumlah sekolah-sekolah sejak tahun 1870-an maka variasi saja berasal dari keluarga pejabat bumiputera, tetapi kemudian juga berasal dari keluarga pengusaha, pedagang dan petani. Sampai akhir 1860-an, sekurang-kurangnya terdapat sekitar 24 buah sekolah yang tersebar di seluruh kawasan Sumatera Barat tidak termasuk (Residen Tapanuli), dengan perincian 10 buah di kawasan pantai dan 14 buah di kawasan pedalaman. Sekitar abad ke-20 perbandingan jumlah penduduk di kawasan itu adalah 4 : 9, tetapi ratio murid- muridnya yang bersekolah adalah 1 : 9. Minat pendidikan yang lebih besar justru datang dari kelas menengah, yang biasanya terdiri dari keluarga pengusaha, pedagang dan golongan orang yang berada. Kebanyakan mereka berasal dari negeri-negeri perantau yang padat penduduknya, terutama di sekitar dataran tinggi Agam.

Pemerintah Belanda nampaknya masih tetap bersikap keras kepala, ketika mereka mau menerapkan gagasan kebijaksanaan pendidikannya yang mengutamakan keluarga yang dekat hubungannya dengan rezim kolonial, sementara jalur pendidikan bagi yang lain masih tetap terbuka. Salah satu akibatnya ialah bahwa kebanyakan orang berpendidikan Barat jika bukan

mayoritas tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan keturunan darah bangsawan tradisional sebagaimana yang diharapkan pemerintah Belanda dan dalam jangka panjang reaksi mereka terhadap kebijaksanaan pendidikan kolonial nampaknya paralel dengan reaksi yang diberikan terhadap kebijaksanaan pemerintah umumnya. Bagian akhir ini akan mencoba memberikan beberapa pandangan penutup yang mungkin dapat ditarik dari uraian-uraian yang dikembangkan dimuka.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Sejak semula telah terbukti nyata, bahwa tanpa dukungan orang-orang bumiputera atau sebagian dari padanya, penguasa kolonial Belanda niscaya menemui lebih banyak kesulitan dalam menjalankan administrasinya. Manipulasi hubungan-hubungan kolonial terutama didasarkan pada sistem kelas menurut struktur sosial setempat. Maka suatu suprastruktur yang ditempati oleh kekuatan bangsa asing (Belanda), yang merupakan ciri khas dari struktur masyarakat kolonial umumnya, ditopang oleh sejumlah para kepala *volkschoolden* yang terdiri dari para penghulu atau *angku kepala dan Laras*.

Dari sudut pandangan pemerintah adalah logis untuk memanfaatkan mereka, karena para kepala merupakan basis kekuasaan kolonial yang dapat berfungsi ganda. Ketika para kepala segera ditarik ke dalam struktur yang resmi, mereka berfungsi sebagai "ambtenaar" yang menangani tugas administrasi kolonial di tingkat bawah dalam struktur birokrasi yang ada. Tetapi pada saat yang sama sebagai kepala dalam struktur sosial yang lama, mereka tetap memegang posisi kunci dalam menjalankan politik kolonial. Kombinasi kedua fungsi ini menimbulkan raga bangsa dalam diri mereka, dan dengan itu pemerintah Belanda memanfaatkan mereka sebagai *Steunpilaren vangezag*.

Daftar Pustaka

- G.J. Resink. 1968. *Indonesia's History Between the Myths* (The Hague : Martinus Nijhoff, 1968) khususnyapp.103-105.
- Philip G. Altbach and Gail P. Kelly, *Education and Colonialisme* (New York : 1978) terutama pada Bab Pendahuluan, pp.1-47.
- Robert Van Niel. 1960. *The Emergence Of the Modern Indonesian Elit*. Bandung, pp. 2, 29, 165, dan242.
- E. Graves. 1962. *The Minangkabau Response to Teach Colonial Rule In the Nineteenth Century*. Ithaca, New York : Monograph Series, No. 60, Cornell Modern Indonesia Project, 1981.
- M. Joustra, *Batakspingel* (Leiden : S.C. Van Dusburg, 1926), p.32.
- E. B. Kielstra, "Koffij Cultuur ter Sumatra's" *estkust*" IG, X (1888), p.1458.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2009) *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Jakarta: Bumi Aksara), Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004
- Kartini Kartono, (1980), *pengantar metodologi research social*, Bandung: alumni
- M. Iqbal Hasan, (2002), *Pokok -pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesia